

Judul : Catatan Anggota Komisi VI DPR, industrialisasi dan inovasi pacu pertumbuhan ekonomi
Tanggal : Sabtu, 27 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Catatan Anggota Komisi VI DPR

Industrialisasi Dan Inovasi Pacu Pertumbuhan Ekonomi

Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa kepemilikan aset besar tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

FAKTOR penentunya justru terletak pada arah kebijakan dan keberanian politik dalam memanfaatkan aset negara untuk mendorong industrialisasi dan inovasi. Catatan itu disampaikan Anggota Komisi VI DPR Darmadi Duriyanto di Jakarta, Jumat (26/12/2026).

Ia merujuk pada teori pertumbuhan endogen yang dikembangkan ekonom Philippe Aghion dan Peter Howitt, yang menekankan bahwa pertumbuhan jangka panjang hanya dapat dicapai melalui inovasi berkelanjutan, riset, serta persaingan usaha yang sehat.

Pandangan tersebut, kata Darmadi, relevan dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Meski pertumbuhan ekonomi relatif stabil, produktivitas nasional dinilai masih tertinggal. Kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB)

berada di kisaran 18–19 persen, jauh menurun dibandingkan era 1990-an yang pernah melampaui 27 persen. Sementara itu, belanja riset dan pengembangan (R&D) nasional masih sekitar 0,3 persen dari PDB.

Dalam konteks itu, Darmadi menilai posisi Danantara berada di titik penentuan. Danantara harus jadi momentum penting bagi perubahan arah pembangunan ekonomi nasional, tidak berhenti sebagai pengelola aset negara semata, melainkan diarahkan menjadi instrumen pencipta pertumbuhan ekonomi baru.

"Jika diarahkan sebagai instrumen kebijakan industri aktif, Danantara bisa menjadi pengungkit transformasi ekonomi yang selama ini absen," kata Darmadi.

Darmadi menegaskan, Danantara akan menjadi catatan penting dalam sejarah ekonomi



Darmadi Duriyanto

Indonesia. "Danantara akan dicatat sejarah bukan dari besar kecilnya aset yang dikelola, tetapi dari keberaniannya memaksa Indonesia keluar dari ekonomi nyaman menuju ekonomi berdaya saing," tegasnya.

Lebih lanjut, Darmadi menyoroti peran negara dalam pengalaman negara-negara yang berhasil melakukan industrialisasi, seperti Korea Selatan dan Taiwan. Menurutnya, negara-negara tersebut tidak menyerahkan

sepenuhnya arah pembangunan pada mekanisme pasar, melainkan menjalankan kebijakan industri yang disiplin dan menuntut kinerja.

Dalam konteks Indonesia, ia menilai kebijakan industri selama ini terlalu sering berhenti pada proteksi dan insentif umum tanpa kewajiban inovasi yang jelas, sehingga berisiko menciptakan ekonomi rente.

Karena itu ia menyarankan agar BUMN tidak hanya besar dari sisi aset, tapi harus kuat di sisi inovasi. "Belanja R&D BUMN rata-rata masih di bawah 1 persen dari pendapatan, jauh tertinggal dibandingkan perusahaan global seperti Samsung atau Huawei," Darmadi mengingatkan.

Karena itu, politisi kawakan yang selama duduk di komisi terkait BUMN ini, mendorong perubahan indikator kinerja BUMN. Selain laba dan dividen, ukuran keberhasilan harus mencakup belanja R&D, jumlah paten, penguasaan teknologi, substitusi impor bernilai tinggi, serta ekspor

produk industri berteknologi menengah hingga tinggi.

Ia juga mendorong peningkatan belanja riset dan pengembangan nasional secara bertahap menuju minimal 1 persen dari PDB. Dengan PDB Indonesia sekitar Rp20.000 triliun, kebutuhan dana riset diperkirakan mencapai Rp200 triliun per tahun.

"Tanpa keberanian menaikkan belanja riset dan memaksa inovasi, target pertumbuhan tinggi hanya akan hidup di pidato, bukan di pabrik dan laboratorium," kata Darmadi.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa transformasi ekonomi berbasis inovasi tidak boleh mengabaikan dampak sosial. Negara, menurutnya, harus hadir mengelola transisi melalui pendidikan vokasi, pelatihan ulang tenaga kerja, dan jaring pengaman sosial.

"Negara Pancasila bukan negara yang takut perubahan, tetapi negara yang memastikan perubahan berjalan adil dan manusiawi," ujarnya. ■ PYB